

Development of competitive advantages for tiger prawn breeding business actors in Muara Badak, Kutai Kartanegara Regency, as an optimization of strengthening the coastal gender economy

Arditiyaa , Euis Happy Wangloan, Agus Rony Katili, Bambang Tri Murtiono, Anisah Azizah

Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda, Indonesia

 arditiya.mitra@polnes.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.8490>

Abstract

This Indonesia is an archipelagic country with a strategic plan for the development of a maritime-based economic sector that is integrated with blue economy principles. Improving the quality of life of coastal communities is a central issue of sustainable development. Tiger prawn breeding is a competitive advantage for coastal communities through hatchery and marketing of export quality seeds. The low level of understanding of coastal communities in the management of tiger shrimp culture has an impact on the climate of business independence, so this is also a focus of problems in community partnership service activities. Optimizing the role of women as a representative of the coastal gender economy is a novelty goal and value that must be achieved in order to realize the ideals of a blue economy that supports national economic development through the maritime sector. The development of competitive advantage in Muara Badak Subdistrict, Kukar Regency is carried out using pre-activity input methods, activity processes, outputs and mentoring evaluations to strengthen family and business financial literacy, marketing management, to provide stimulation in the form of strategies in dealing with the threat of export failure and others. The result of the program is an increase in the capability of tiger prawn breeding business actors in Muara Badak District, Kutai Kartanegara Regency.

Keywords: *Tiger prawns, Gender economy, Competitive advantage, Muara Badak*

Pengembangan keunggulan kompetitif pelaku usaha budidaya udang windu di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai optimalisasi penguatan ekonomi gender pesisir

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan rencana strategis pengembangan sektor perekonomian berbasis kemaritiman yang terintegrasi dengan prinsip *blue economy*. Peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat pesisir menjadi isu sentral pembangunan berkelanjutan. Pembudidayaan udang windu merupakan keunggulan kompetitif masyarakat pesisir pantai melalui pembenihan dan pemasaran bibit berkualitas ekspor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat pesisir dalam pengelolaan manajerial budidaya udang windu memiliki dampak terhadap iklim kemandirian usaha, sehingga hal ini juga menjadi fokus permasalahan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat. Optimalisasi peran perempuan sebagai representasi ekonomi gender pesisir menjadi tujuan dan nilai novelty yang harus dicapai guna mewujudkan cita-cita *blue economy* yang mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui sektor kemaritiman. Pengembangan keunggulan kompetitif di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kukar dilaksanakan dengan metode input prakegiatan, proses kegiatan, output dan evaluasi

pendampingan terhadap penguatan literasi keuangan keluarga dan usaha, manajemen pemasaran, hingga memberikan stimulasi berupa strategi dalam menghadapi ancaman gagal ekspor dan lainnya. Hasil dari kegiatan berupa meningkatnya kapabilitas pelaku usaha budidaya udang windu di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: Udang windu; Ekonomi gender; Keunggulan kompetitif; Muara Badak

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan status kepulauan terbesar dunia. Posisi strategis ini, sudah sewajarnya apabila Indonesia dapat memanfaatkannya untuk menciptakan keunggulan dalam menunjukkan potensi bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi. Melalui amanat tersebut, Presiden RI memaparkan bahwa sebagai negara kepulauan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang salah satu fokusnya adalah tol laut dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah (Saragi et al., 2018). Indonesia yang dikatakan negara kepulauan dengan luas lautan melebihi daratan tentunya secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Sebagai negara kepulauan, harusnya Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Namun sayangnya, julukan Indonesia sebagai negara maritim dipandang belum tepat. Alasan mendasar mengenai hal ini dikarenakan paradigma pembangunan di Indonesia selama beberapa dekade ini bias daratan (Kadar, 2015). Akibatnya ketimpangan pembangunan antara daratan dan lautan begitu terlihat. Sebagai penggagas ekonomi berkelanjutan berbasis pesisir, Presiden RI juga mengemukakan bahwa secara geografis konsep pengembangan ekonomi ke arah maritim dengan mengedepankan prinsip *blue economy* menjadi lebih jelas, karena semua sektor telah menyambutnya sebagai rencana strategis pembentukan ekonomi berkelanjutan ramah lingkungan.

Keberadaan sumber daya pesisir dan laut diharapkan semakin meningkat di masa mendatang untuk mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Setidaknya terdapat dua alasan utama yang mendukung tren tersebut. Pertama, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sebesar 1,8% per tahun, dan penduduk Indonesia akan mencapai 250 juta. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan akan sumber daya dan jasa lingkungan. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam di darat semakin berkurang dan tidak mencukupi lagi, sehingga pilihannya terfokus pada pemanfaatan sumber daya dan jasa pesisir dan laut untuk menopang pertumbuhan yang ada sambil terus berlanjut. Kedua, Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau, panjang pantai sekitar 81.000 km dan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa perairan (laut). Wilayah pesisir dan laut menyediakan sumber daya alam yang produktif sebagai sumber pangan, mineral dan energi, media komunikasi, dan sumber regional untuk rekreasi atau pariwisata. Oleh karena itu, pantai dan perairan merupakan dasar harapan manusia untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan pesisir dan kelautan, suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak terlepas dari kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut. Kegiatan ini sering melibatkan membuat perubahan pada sumber daya alam. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada lingkungan. Semakin cepat laju pembangunan, semakin besar penggunaan sumber daya alam dan semakin besar pula

perubahan yang terjadi di lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekosistem pesisir dan laut yang berdampak pada pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip ekologi yang berlaku untuk mengurangi dampak merugikan yang merugikan terhadap keseluruhan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pencapaian pembangunan pesisir dan laut dalam suatu lingkungan pembangunan memerlukan pertimbangan yang matang dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut serta keterpaduannya ke dalam rencana pembangunan (Bengen, 2001).

Pemikiran ini, secara istilah dinamakan proyek pesisir dengan mengambil pendekatan dua arah. Seperti halnya desentralisasi pengelolaan semakin meningkat mengingat masih banyaknya kasus tumpang tindih rencana, konflik politik dan persaingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang berujung pada upaya pelestarian pesisir serta ketidakjelasan kewenangan dan pengabaian sumber daya laut. lebih mendesak. Tujuan *blue economy* dalam pembangunan sektor pesisir adalah untuk memberikan pengelolaan sumber daya yang baik/efektif di wilayah pesisir melalui pengembangan dan penerapan metode, strategi, kegiatan perencanaan dan peraturan daerah yang dapat meningkatkan atau mempertahankan kualitas kehidupan di wilayah pesisir. Kemudian memperbaikinya atau mempertahankan kondisi sumber daya pantai di mana banyak orang mencari nafkah. Pendekatan desentralisasi ini didasarkan pada hipotesis bahwa pendekatan pengelolaan yang terdesentralisasi, partisipatif dan kolaboratif mengarah pada pengelolaan lingkungan dan sumber daya pesisir yang lebih berkelanjutan (Bengen, 2001).

Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat luas (termasuk politisi) terhadap pentingnya peranan pesisir dan lautan dalam pembangunan di Indonesia, maka dewasa ini istilah “Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (PWPT)” bukanlah satu hal yang asing lagi. Tujuan akhir dari PWPT adalah meningkatkan kualitas hidup dari komunitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya yang terkandung di wilayah pesisir dan pada saat yang bersamaan juga menjaga keanekaragaman hayati dan produktivitas dari ekosistem pesisir tersebut (Bengen, 2001). Sehingga untuk mencapainya diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan realistis. Proses perencanaan suatu program pengelolaan serta kemudian implementasi dari apa yang direncanakan tersebut merupakan satu siklus yang berkesinambungan.

Marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadi masalah global dan hal ini nampak nyata pada peran perempuan di sektor kemaritiman (Anggraini & Agus, 2018). Terutama ketika analisis gender dalam komunitas pesisir tidak sekedar membicarakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada persoalan pengambilan keputusan dalam proses dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya kelautan yang pada gilirannya, memunculkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menitikberatkan perhatian pada sektor pembudidayaan sektor kemaritiman seperti udang windu. Sementara itu, wajah lain dari pembangunan, pengurangan kemiskinan di antaranya dengan mengurangi kerentanan masyarakat miskin dan persoalan kesetaraan gender di bidang perikanan dan kelautan menjadi kian penting. Pemberian bantuan dan bukan pemberdayaan justru menyebabkan modal sosial masyarakat berupa kejujuran dan kegotong-royongan terkikis. Sehingga proses pemberdayaan seperti halnya modal sosial akan mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma dan jaringan-jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam masyarakat melalui fasilitas bagi tindakan-tindakan yang

terkoordinasi. Berangkat dari fenomena tersebut, pengabdian kemitraan masyarakat akan berupaya memberikan stimulasi berupa penguatan usaha kompetitif udang windu di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan dampak yang signifikan dari akademisi bagi kemajuan ekonomi kerakyatan (Guslan, 2016). Sebab salah satu budidaya perikanan yang memiliki prospek usaha yang cukup baik untuk dikembangkan adalah budidaya udang windu. Di samping termasuk dalam komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi karena tergolong komoditas ekspor, juga karena memiliki keunggulan komparatif, berukuran besar dan dapat dikembangkan secara organik dan tradisional. Sehingga cita-cita pembangunan nasional tentang ekonomi kreatif yang berbasis pengembangan sektor kemaritiman dapat berkembang.

Kondisi yang terdapat di lokasi mitra, menggambarkan potensi yang telah tersedia disajikan pada Gambar 1. Hal ini dapat dilihat dengan sarana dan prasarana yang telah memadai, seperti kolam pembibitan, penyaringan air pembenihan, mesin suling air laut, dan lainnya. Sehingga pengoptimalan proses pembinaan diharapkan dapat meningkatkan potensi unggulan kegiatan budidaya udang windu. Permasalahan yang terdapat di masyarakat dan dialami secara langsung ialah, terbatasnya informasi dan pendampingan tenaga ahli terhadap proses manajerial pembudidayaan udang windu di wilayah pesisir pantai Muara Badak. Kerugian yang dihasilkan oleh para nelayan, tidak hanya terjadi karena persoalan teknis seperti tata cara pembudidayaannya, namun secara spesifik mengarah kepada proses pengaturan penjadwalan pembibitan, pemeliharaan, panen, hingga pendistribusian yang sangat mempengaruhi secara signifikan proses pembudidayaan udang windu. Dalam kegiatan tersebut perempuan desa terlibat secara penuh. Tidak jarang kaum perempuan desa yang mengelola proses pembudidayaan minim literasi ekonomi maupun teknis di lapangan. Sehingga dengan terciptanya iklim manajerial yang baik, maka akan terbentuk kekuatan kegiatan usaha di sektor pesisir tersebut. Dengan memanfaatkan pendampingan secara terstruktur dengan mengelola literasi manajerial sumber daya alam dan manusia yang tersedia, maka akan tercapai suatu sinergitas antara teknis pembudidayaan dan pengelolaan secara baik. Tujuan dari kegiatan ini akan meningkatkan kapabilitas ekosistem pengelolaan keuangan dan manajerial sistem budidaya. Sehingga dalam situasi apapun pengusaha budidaya siap dengan berbagai tantangan yang ada.



Gambar 1. Budidaya Udang Windu Milik Mitra

2. Metode

Program pendampingan dan penguatan kompetensi usaha budidaya udang windu dilaksanakan di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat beberapa kelompok usaha budidaya udang windu di lokasi tersebut, namun satu di antaranya bernama budidaya ‘Windu Permata’, yang dijadikan sasaran kemitraan program penguatan dan pendampingan. Usaha ini didirikan sejak tanggal 12 September 2017 dengan total nilai investasi sekitar Rp 300.000.000 dan omset per bulan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000. Program pendampingan dan penguatan usaha tersebut dilaksanakan pada bulan September 2022.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah berdasarkan input, proses dan output. Dengan melakukan proses penjajakan/survei lapangan terlebih dahulu akan mendapatkan data-data valid terkait kebutuhan mitra yang dapat disinergikan dalam kegiatan program kemitraan. Proses wawancara terstruktur kepada pelaku usaha juga dilakukan agar mendapatkan data yang dapat menjadi indikator pencapaian program pendampingan oleh tim ahli. Pendokumentasian lokasi juga dilakukan untuk memverifikasi kebenaran kegiatan program.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Input pra kegiatan

Sebelum melakukan kegiatan pendampingan, tim melakukan survei ke lokasi Desa Tanjung Limau sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuan tim melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan Desa Tanjung Limau. Kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk observasi partisipatoris, dengan mencatat beberapa persoalan kunci yang dapat menjadi data dukung dalam proses kegiatan.

Selanjutnya dilakukan survei ke pelaku usaha seperti [Gambar 2](#), dengan melakukan studi kelayakan terhadap tempat pembibitan dan pembenihan yang digunakan pelaku usaha. Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka Panjang. Tahap terakhir dari input pra kegiatan adalah pemilihan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kemudian penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan PKM ini juga dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi pertemuan yang dapat menjangkau keberadaan masyarakat.



Gambar 2. Proses survei lokasi mandiri

3.2. Sosialisasi dan pendampingan

Pendampingan dan sosialisasi literasi keuangan usaha budidaya udang windu kepada masyarakat sekitar dilakukan dengan diskusi terstruktur yang dimulai dengan pemaparan materi, dilanjutkan dengan studi kasus dan diakhiri tanya jawab. Studi kasus menghasilkan kesiapan pelaku usaha dalam menjawab tantangan-tantangan yang nantinya dihadapi saat berada pada situasi keuangan tertentu.

Selanjutnya dilaksanakan pendampingan dan sosialisasi dalam menjalankan strategi pemasaran udang windu berbasis ekspor dengan memaparkan materi seputar teknis ekspor yang akan dilakukan oleh pelaku usaha. Teknis pemaparan berupa penyampaian materi dan simulasi proses ekspor jika pada suatu saat akan dilakukan oleh pelaku usaha. Diakhiri dengan tanya jawab yang dipandu oleh pemateri secara langsung. Pemateri memberikan kiat-kiat yang mendukung kesiapan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor, terutama terkait perizinan.

Pada sesi terakhir, dilaksanakan pelatihan dalam menyusun strategi dalam ancaman kegagalan panen atau mitigasi risiko. Kegiatan ini berupa pendampingan yang dilakukan oleh beberapa tenaga ahli yang meninjau keadaan di lapangan, terkait tingkat kualitas air dalam pembenihan, penggunaan alat penyuling air, hingga pencahayaan dan penghawaan dalam proses pembenihan yang erat sekali dengan ancaman kegagalan panen. Rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Proses pelaksanaan kegiatan

3.3. Output kegiatan

Output yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini adalah berupa kesiapan mentalitas pelaku usaha (perempuan) di Desa Tanjung Limau dalam memahami manajemen pengelolaan keuangan usaha budidaya udang windu. Hal ini dibuktikan dengan intensitas komunikasi antara tim dengan pelaku usaha, dengan keterlibatan yang berkelanjutan akan memunculkan suatu program yang terukur.

3.4. Evaluasi

Tahapan evaluasi ialah monitoring tim kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait program yang telah dilaksanakan. Bentuknya adalah evaluasi progres yang terjadi setelah dilakukannya pendampingan dan penguatan usaha. Evaluasi yang diterima oleh tim berupa perlunya stimulasi penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan secara praktis yang digunakan sebagai pencatatan biaya masuk dan keluar yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memonitoring keuangan usaha.

4. Kesimpulan

Permasalahan yang terdapat di masyarakat dan dialami secara langsung ialah, terbatasnya informasi dan pendampingan tenaga ahli terhadap proses manajerial pembudidayaan udang windu di wilayah pesisir Pantai Muara Badak. Kerugian yang dihasilkan oleh para nelayan, tidak hanya terjadi karena persoalan teknis seperti tata cara pembudidayaannya, namun secara spesifik mengarah kepada proses pengaturan penjadwalan pembibitan, pemeliharaan, panen, hingga pendistribusian yang sangat mempengaruhi secara signifikan proses pembudidayaan udang windu. Dengan memanfaatkan pendampingan secara terstruktur dengan mengelola literasi manajerial sumber daya alam dan manusia yang tersedia, maka akan tercapai suatu sinergitas antara teknis pembudidayaan dan pengelolaan secara baik.

Daftar Pustaka

- A Kadar. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 427-442. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.33>
- Ahmad Guslan. (2016). Analisis Strategi Saluran Pemasaran Usaha Budidaya Udang Windu di Desa Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. *EJournal Administrasi Bisnis*, 4(4), 975-989.
- Anggraini, O., & Agus, M. (2018). Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir Perspektif Gender di Kabupaten Bantul. *JSEP -Journal of Social and Agricultural Economics*, 11(2). <https://doi.org/10.19184/jsep.v11i2.6889>
- Bengen, D. G. (2001). Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, 28-55.
- Saragi, F. K., Mamahit, D. A., & Prasetyo, T. Y. B. (2018). Implementasi Pembangunan Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Keamanan Maritim*, 4(1), 69-92.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
